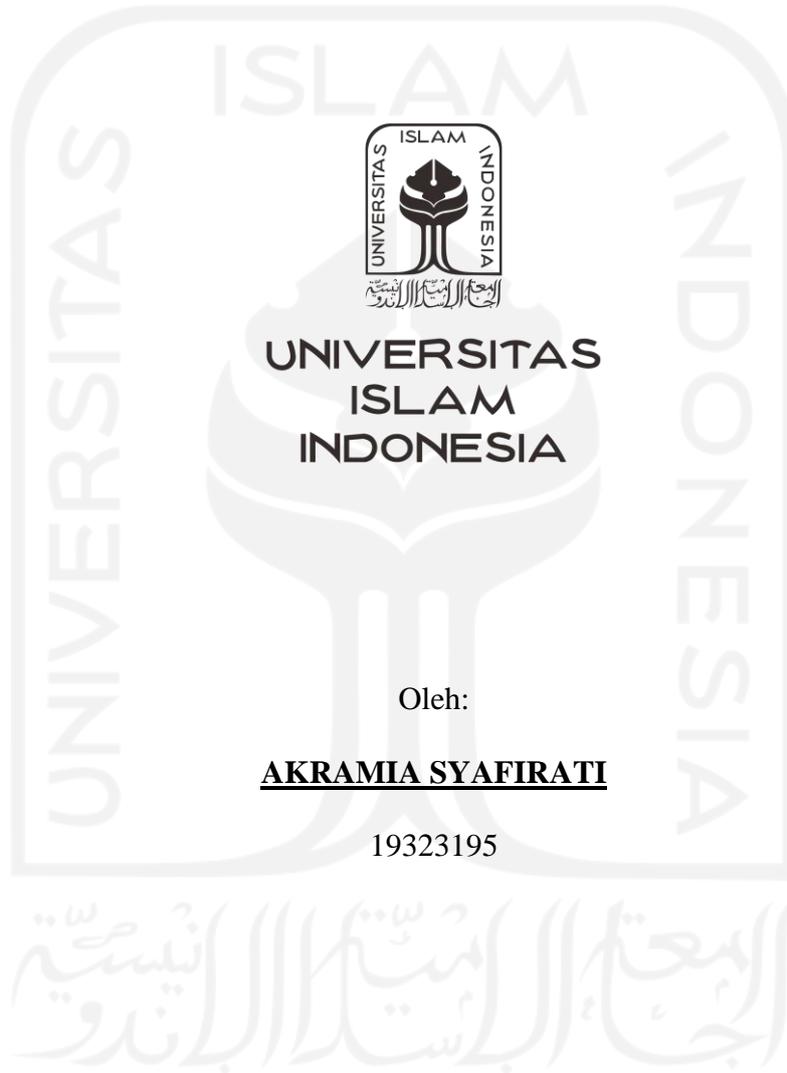


PERSPEKTIF GENDER AND DISASTER DALAM STUDI KASUS

BENCANA ALAM PALU-DONGGALA 2018-2019

SKRIPSI



Oleh:

AKRAMIA SYAFIRATI

19323195

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

PERSPEKTIF GENDER AND DISASTER DALAM STUDI KASUS

BENCANA ALAM PALU-DONGGALA 2018-2019

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

AKRAMIA SYAFIRATI

19323195

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERSPEKTIF GENDER AND DISASTER DALAM STUDI KASUS
BENCANA ALAM PALU-DONGGALA 2018-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

10 Februari 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

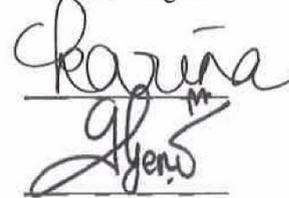
Ketua Program Studi

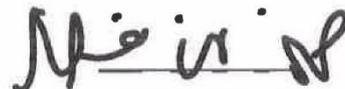

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
2. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A.
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

23 Januari 2023,



Akramia Syafirati



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Tulisan ini saya persembahkan untuk:

Mama dan Papa

Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan.

Teman-teman terdekat

Terima kasih karena selalu ada saat penulis butuhkan

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2019

Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan bersamanya selama masa perkuliahan.

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Albaqarah – Ayat 286)

“Allah is everywhere, so pray anywhere”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa untuk selalutercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammas shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, penulis memberi ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
3. Ibu Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog, selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya UII.
4. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah sangat banyak membantu memberi arahan dan masukan di tengah kesibukan beliau. Semoga Ibu Karin selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya.
5. Seluruh dosen Hubungan Internasional UII yang telah memberikan banyak pelajaran, yang bukan hanya ilmu, namun juga hal lain yang penulis bisa dapatkan. Semoga Allah membalas kebaikan bapak dan ibu dosen sekalian.
6. Kepada orang tua saya yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doanya kepada saya. Terima kasih untuk segala kasih sayangnya.

7. Kepada teman-teman terdekat saya selama masa perkuliahan, baik teman di kuliah maupun teman sejak dulu. Terutama kepada Sindi dan Selly tempat saya berkeluh kesah dan selalu dapat saya percaya. Terima kasih atas kehadiran kalian.
8. Teman-teman HI UII Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Meskipun termasuk angkatan covid karena hanya bisa kuliah luring satu semester, namun masa perkuliahan saya akan selalu saya kenang dan rindukan. Semoga kita bisa sukses di masa depan.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Cakupan Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Pemikiran.....	13
1.7 Argumen Sementara.....	16
1.8 Metode Penelitian.....	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	17
1.8.4 Proses Penelitian.....	18
1.9 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERAN PEREMPUAN PASCA BENCANA PALU-DONGGALA.....	20
2.1. Kekerasan Gender Pasca Bencana Palu-Donggala.....	20
2.2. Peran Perempuan Pasca Bencana Palu Donggala.....	26
BAB III PARTISIPASI PEREMPUAN PASCA BENCANA PALU- DONGGALA DI RUANG PUBLIK DAN STRATEGI AKAR RUMPUT....	32
3.1. Kurangnya Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Pasca Bencana Palu-Donggala.....	32
3.2. Strategi Akar Rumput Perempuan Pasca Bencana Palu-Donggala....	38
BAB IV PENUTUP.....	45
4.1. Kesimpulan.....	45
4.2. Rekomendasi.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis	46
---	----



DAFTAR SINGKATAN

BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
CVA	: Cash Voucher Assistance
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
FROSAPENA	: Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak
IWAPI	: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KGB	: Kekerasan Berbasis Gender
KPKP-ST	: Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PHP	: Perlindungan Hak Perempuan
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SVA	: Shanti Volunteer Association
TRP	: Tenda Ramah Perempuan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UN	: United Nation
UNFPA	: United Nations Population Fund
YSKK	: Yayasan Satu Karsa Karya

ABSTRAK

Konsep gender dan bencana menjelaskan bagaimana hubungan antara gender dan bencana memiliki keterkaitan dalam memperlemah kelompok perempuan, baik sebelum, saat, maupun sesudah bencana. Pada masa penanganan bencana alam Palu-Donggala 2018-2019 terdapat beberapa temuan utama yang memperkuat ketimpangan gender. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini mengenai ketimpangan gender dalam konsep gender dan bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep gender dan bencana yang terjadi pada bencana alam Palu-Donggala 2018-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian berbasis studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah terdapat kecocokan pada empat temuan utama konsep gender dan bencana pada bencana alam Palu-Donggala, yakni adanya kekerasan gender, ketimpangan peran atau tugas, kurangnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, dan strategi akar rumput yang dapat membangun kembali kekuatan perempuan setelah bencana.

Kata kunci: gender, bencana alam, Palu-Donggala, perempuan.

ABSTRACT

The concept of gender and disaster explains how the relationship between gender and disaster has a connection in weakening women's groups, both before, during and after disasters. During the handling of the 2018-2019 Palu-Donggala natural disaster, there were several main findings that reinforced gender inequality. Therefore, the urgency of this research is about gender inequality in the concept of gender and disaster. The purpose of this research is to analyze the concept of gender and disaster that occurred in the 2018-2019 Palu-Donggala natural disaster. The research method used in this research is a qualitative approach, with a literature study-based research type. The result of this research is that there are matches in the four main findings of the concept of gender and disaster in the Palu-Donggala natural disaster, namely the existence of gender violence, inequality of roles or duties, lack of women's participation in the public sphere, and grassroots strategies that can rebuild women's strength after the disaster.

Keywords: gender, natural disaster, Palu-Donggala, women

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu sosial mengenai gender dan bencana bersandar pada fakta sosial bahwa gender sebagai prinsip pengorganisasian utama masyarakat dan keyakinan bahwa gender harus ditangani jika ingin mengklaim pengetahuan mengenai semua orang yang berada di lingkungan beresiko. Secara teoritis, bencana dan gender mengkaji mengkaji hubungan gender dalam konteks kategori lain dari perbedaan dan kekuasaan sosial seperti ras, etnis, kebangsaan, dan kelas sosial (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 130). Hubungan gender adalah bagian dari pengalaman manusia atas bencana dan dalam kondisi tertentu dapat mengarah pada pengingkaran terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam krisis.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang rawan akan bencana alam dan berpotensi besar terkena tsunami dan gempa karena berada di garis khatulistiwa. Berdasarkan data, Indonesia mengalami bencana alam dengan resiko paling rentang terhadap tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami (Amri et al. 2016). Dampak suatu bencana berdampak kepada seluruh aspek kehidupan. Bagaimana masyarakat merespon dan bangkit kembali setelah terdampak bencana tergantung dari berbagai faktor. Contohnya adalah perempuan yang hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan pertanian tetapi tidak memiliki kontrol atau ruang atas lahan akibat diskriminasi. Akan sulit untuk memulihkan diri dan keluarganya setelah bencana terjadi. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kerentanan yang berbeda, namun perempuan cenderung mendapat resiko dan tantangan lebih tinggi

dalam fase pasca bencana alam. Khususnya wanita dari kalangan bawah, lanjut usia, dan kelompok minoritas. Terdapat banyak tantangan yang dihadapi laki-laki dan perempuan dalam rekonstruksi pasca bencana. Akses perempuan saat pasca bencana menjadi terhambat juga karena kondisi yang sudah ada sebelumnya dari perspektif sosial budaya (Purnama 2017).

Bencana alam gempa bumi yang mengguncang wilayah Palu dan Donggala pada 28 September 2018 dengan magnitude 7,4 berhasil memporak-porandakan wilayah tersebut (Julius et al. 2020). Belum usai masyarakat menata puing akibat gempa, BMKG sudah memberi peringatan diri terkait status siaga untuk pantai Donggala akan tsunami. Bencana tsunami Palu, Sulawesi pada 28 September 2018 adalah peristiwa yang awalnya bermula dari gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter, kemudian diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi Utara pada pukul 18.02 WITA. Gempa ini bukan lah yang pertama mengingat wilayah Palu-Donggala yang berada di jalur sesar Pulau Koro yang merupakan jalur melintasnya gempa, namun gempa tahun 2018 inilah yang terkuat. Setelah gempa besar terjadi, masyarakat hanya memiliki waktu 10 menit untuk melarikan diri dari tsunami setinggi enam meter setelah gempa mengguncang. Berdasarkan ulasan platform media *online*, BBC, terdapat sekiranya 2.000 korban meninggal yang ditemukan (Henschke and Lin, 2018).

Namun, jumlah tersebut belum tidak dapat diketahui secara pasti karena sejumlah daerah permukiman tersapu habis oleh tsunami dan likuifaksi, sehingga merenggut banyak nyawa. Dalam bencana Palu-Donggala bukan hanya kerusakan infrastruktur yang cukup parah, bencana ini juga berdampak pada permasalahan sosial seperti kekerasan berbasis gender terutama terhadap perempuan..

Berdasarkan UN Women, tempat penampungan yang padat dan tidak memiliki privasi serta manajemen kamp dan listrik, memperparah kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan resiko keamanan terutama bagi perempuan dan anak perempuan (“Central Sulawesi Earthquake and Tsunami” 2018).

Menerapkan lensa gender ke bidang penelitian bencana dan banyak bidang terkait termasuk pengurangan risiko bencana, manajemen bencana, kemanusiaan, konflik dan pembangunan perdamaian merupakan kesempatan untuk memfokuskan pertanyaan penelitian pada sosial-ekonomi, faktor politik dan budaya yang menciptakan dan memperburuk risiko. Kondisi seseorang dapat diperparah pada penanganan bencana berdasarkan jenis kelamin mereka, rumah tangga yang dimiliki. Oleh karena itu memperhatikan perbedaan gender dibutuhkan dalam melakukan mitigasi bencana. Perbedaan-perbedaan kondisi yang dialami perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh aspek biologis dan kultur-sosial (Anisa and Santoso, 2020). Penanganan yang responsif gender diperlukan sebab hal itu merupakan penelitian yang menangani ketidaksetaraan yang dirasakan oleh perempuan, sehingga secara perlahan kajian ini bisa mendapatkan momentum bagi para praktisi dan pembuat kebijakan. Gender dan bencana bukan hanya untuk membantu menghubungkan kerentanan resiko dengan masalah ketidaksetaraan, kekuasaan, dan keadilan saja. Selanjutnya gender dan bencana juga dapat bekerja dalam konteks kemanusiaan dan pembangunan (Acciari, Fordan, and Masson, 2020).

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana penanganan pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu-Donggala tahun 2018 memiliki keterkaitan dengan konsep gender dan bencana. Bencana alam menurut *Asian*

Disaster Reduction Center adalah gangguan serius terhadap fungsi komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan dampak berupa korban, material, ekonomi atau lingkungan yang meluas dan melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri (Anisa and Santoso, 2020). Kondisi setelah bencana di Palu-Donggala merugikan banyak sektor seperti di sektor pembangunan dan infrastruktur, dan sosial. Bencana juga mempengaruhi kerusakan pada mata pencaharian dan sektor usaha, sehingga pekerjaan mereka lumpuh dan memprihatinkan (Samad, Erdiansyah, and Wulandari 2020). Perempuan dalam hal ini harus turut bekerja membantu keuangan keluarga karena tidak bisa mengandalkan laki-laki yang pekerjaannya bergantung pada alam yang sedang rusak, sehingga mereka harus bekerja ganda. Bencana seringkali dipicu oleh bahaya alam atau interaksi antara ulah manusia dan fenomena alam. sementara, definisi gender sendiri adalah kondisi di mana laki-laki atau perempuan biasanya digunakan dengan mengacu pada perbedaan sosial dan budaya dibanding biologis. Perbedaan gender juga tercermin dalam; peran, tanggung jawab, akses ke sumber daya, kendala, peluang, kebutuhan, persepsi dan pandangan yang dipegang oleh perempuan dan laki-laki.

Di Sulawesi Tengah sendiri sebelum bencana sudah terdapat kasus mengenai gender dalam hal kekerasan dan budaya patriarki. Seperti yang dirasakan oleh perempuan di Sulawesi Tengah saat sedang hamil-nifas mendapat perlakuan yang tidak terlepas dari adanya norma sosial dan agama yang membolehkan laki-laki mengontrol perempuan. Mereka diatur dan dipantau secara ketat oleh keluarga bahkan masyarakat sekitar. Selain itu, di pedesaan maupun perkotaan Kabupaten

Donggala perempuan masa hamil-nifas juga mendapat kekerasan dari suami mereka (Nur 2012). Terlepas dari itu, dengan adanya bencana dan kondisi yang tegang menambah penderitaan perempuan menjadi semakin terancam. Kondisi pasca bencana meningkatkan ketegangan sehingga mendorong untuk melakukan kekerasan (Alfarizy, 2020). Isu gender bukanlah pelaksanaan dari situasi krisis terkait bencana, melainkan operasional masyarakat dan kelayakan dalam kehidupan sehari-hari di tingkat individu, komunitas, dan masyarakat pada umum dan tercermin dalam norma sosial dan budaya (Enarson and Chakrabarti, 2009). Oleh karena itu, aspek gender dalam masyarakat memberikan perbedaan substansial mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan dari semua umur mengalami dan menghadapi sebelum, saat dan sesudah bencana. Tindakan netral dalam siklus bencana pada dasarnya tidak netral, tetapi mendorong perempuan pada situasi sulit, penghinaan, dan meningkatkan resiko menjadi korban kekerasan, dan mengurangi akses terhadap peluang dan pilihan yang tersedia.

Di Sulawesi Tengah, kekerasan berbasis gender (KBG) masih awam diperbincangkan karena kurangnya kesadaran mengenai kesetaraan gender dan masih dianggap sebagai hal yang tidak berbahaya. Di Kota Palu, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai jenis kekerasan seperti dipukul maupun ditelantarkan selama satu tahun tanpa diberi uang maupun barang (Julianty 2013). Di mana budaya patriarki memposisikan perempuan atau istri pada posisi yang lemah. Gender dalam konsep risiko bencana dibangun atas pemahaman bahwa perempuan dan laki-laki adalah bagian dari masyarakat yang sama yang memiliki hak, pendidikan, dan opsi yang sama baik di waktu normal maupun situasi saat bencana. Pasca bencana bukan hanya dapat menimbulkan kekerasan terhadap

perempuan, namun dalam konsep gender dan bencana perempuan memiliki banyak keikutsertaan dalam pembangunan maupun mengatasi ketidaksetaraan gender (Ashraf and Azad, 2015). Masa penanganan pasca bencana pun tidak luput dari ketimpangan-ketimpangan berbasis gender. Posisi perempuan yang lemah, keadaan yang darurat, tekanan lebih besar, serta runtuhnya layanan dan infrastruktur dapat meningkatkan risiko tersebut. (Nuriana, Rusyidi, and Fedryansyah, 2019).

Terdapat banyak faktor yang memperkuat konsep gender dan bencana, seperti adanya perbedaan ras atau etnis dalam pemberian bantuan berdasarkan gender, munculnya kekerasan terhadap perempuan, pembagian tugas, hingga usaha pembenahan usai bencana terjadi dan pengembalian layanan bantuan. Faktor sosial budaya, faktor ini paling sering dilibatkan dalam terjadinya kekerasan, sebab sejumlah peneliti mengaitkan ketimpangan gender dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang disebut patriarki. Budaya patriarki tersebut menciptakan kondisi perempuan yang berada di bawah laki-laki dan mendorong terjadinya ketimpangan. Perempuan sulit untuk mendapat mata pencaharian karena dianggap bukan sebagai kepala rumah tangga. LSM yang membantu masyarakat dalam membangun penampungan mengutamakan kelompok rentan seperti orang tua, orang cacat, dan rumah tangga yang dikepalai perempuan. (“Pedoman Pengintegrasian Gender” 2021)

Meskipun sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai konsep gender pada bencana alam, namun kasus bencana alam Palu-Donggala 2018 masih belum ada yang meneliti, sehingga penulis tertarik untuk meneliti kejadian ini. Fenomena ini telah tersorot oleh UN Women, yang terdapat dalam salah satu temuan utama dalam konsep gender dan bencana, yakni timbulnya kekerasan saat

pasca bencana. Menurut UN Women, di Sulawesi Tengah terdapat ketidaksetaraan gender seperti kontrol terhadap perempuan yang terbatas atas sumber daya dalam rumah tangga, partisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan, serta kekerasan berbasis gender (“Central Sulawesi Earthquake and Tsunami” 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana isu gender pada konsep gender dan bencana terhadap bencana alam Palu-Donggala 2018-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana isu gender yang terjadi pada bencana alam Palu-Donggala 2018-2019 berdasarkan konsep gender dan bencana. Dari konsep gender dan bencana terdapat beberapa temuan utama yang terjadi pada bencana Palu-Donggala. Bagaimana temuan-temuan utama tersebut terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perempuan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, beberapa temuan utama tersebut dianalisis untuk mengetahui isu gender yang terjadi pada bencana alam Palu-Donggala 2018-2019 yang sesuai dengan konsep gender dan bencana.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini mengambil lingkup waktu pada tahun 2018-2019, tahun 2018 adalah di mana terjadi bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu-Donggala dan menjadi bencana alam yang menarik banyak perhatian publik bahkan sampai mancanegara. Di Sulawesi Tengah, kekerasan berbasis gender (KBG) masih awam diperbincangkan karena kurangnya kesadaran mengenai kesetaraan gender dan masih dianggap sebagai hal yang tidak berbahaya (Indonesia UNFPA, 2019). Berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, bencana Palu-Donggala adalah bencana yang mengguncang dunia sebagai bencana terbesar sejak 5 tahun silam sejak 2018 (“10 Bencana Alam Terbesar di Indonesia” 2022). Sementara berdasarkan data BNPB tahun 2018, terdapat bencana yang menimbulkan dampak yang sangat berat, diantaranya gempa di Lombok dan Sumbawa menyebabkan 564 korban jiwa, dan gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dengan 2.081 korban jiwa. Tahun 2018-2019 ditemukan banyak kerentanan yang melemahkan perempuan selama mereka berada di hunian sementara. Cakupan penelitian hanya sampai tahun 2019 karena di tahun selanjutnya perempuan korban bencana sudah mulai bangkit dan sebagian sudah pindah ke hunian tetap yang lebih aman dan bisa menata perekonomian mereka, sehingga jumlah pelemahan terhadap perempuan juga berkurang (Gilang. H, 2020).

Pada bencana besar yang melibatkan tiga jenis bencana ini, Indonesia mendapat banyak bantuan dari berbagai mancanegara. Kemudian, penelitian ini mengambil lingkup analisis konsep gender dan bencana pada bencana alam di Palu-Donggala 2018-2019 dan memberikan contoh perilaku-perilaku apa saja yang melemahkan perempuan pasca bencana menerjang. Subjek dari cakupan penelitian

ini adalah korban perempuan dalam bencana alam Palu-Donggala. Sementara itu, objek dari penelitian ini adalah isu gender dalam konsep gender dan bencana dalam beberapa temuan utama pada penanganan bencana Palu-Donggala. Hal tersebut karena konsep itu yang paling cocok untuk menjadi bahan pembantu dalam menganalisis isu gender pada bencana Palu-Donggala dan masih banyak yang belum menyadari bahwa terdapat pelemahan pada perempuan pasca terjadinya bencana alam. Perempuan masih mendapat perlakuan yang tidak seharusnya saat penanganan bencana, salah satunya adalah dalam penelitian ini. Seperti kekerasan gender, pembagian tugas atau peran yang tidak adil, partisipasi perempuan di ruang publik yang tersingkirkan, serta strategi akar rumput perempuan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini penulis mencoba untuk mengaitkan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah milik penulis. Adapun karya ilmiah yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis adalah sebagai berikut:

Buku dengan judul *Women, Gender, and Disaster: Global Issues and Initiatives* (2009) yang ditulis oleh Elaine Enarson dan P. G. Dhar Chakrabarti menjelaskan bahwa bencana mempengaruhi perempuan laki-laki dengan tidak sama karena adanya gender yang mendalam membuat perempuan berisiko lebih besar menderita saat pasca bencana. Diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya menimbulkan kerentanan terhadap perempuan, amun juga menya-nyiakan potensi sumber ketahanan perempuan. Enarson dan Chakrabarti memaparkan kebutuhan dan perhatian terhadap perempuan dan menunjukkan mengapa perspektif gender

perlu diintegrasikan ke dalam proses manajemen resiko dan bencana. Buku ini juga memberikan contoh-contoh bencana lintas budaya dan akar rumput yang luas menjadi dua bagian penting dari manajemen bencana, yakni tanggap bencana dan pengurangan resiko bencana. Dalam buku ini juga memberikan rekomendasi terkait partisipasi perempuan yang setara dalam pengambilan keputusan dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam strategi pengurangan bencana. Selain itu, buku ini memperjelas bahwa tanpa kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan tidak mungkin terjadi (Enarson and Chakrabarti, 2009).

Selama masa pasca bencana terjadi banyak fenomena kekerasan berbasis gender yang juga terjadi di banyak negara. Hal ini dituliskan dalam salah satu jurnal yang berjudul *Gender Issues in Disaster: Understanding the Relationships of Vulnerability, Preparedness and Capacity* (2015) yang ditulis oleh Mirza Ali Ashraf dan Abdul Kalam Azad. Dalam jurnal ini mengeksplorasi mengenai kerentanan, kesiapsiagaan, dan kapasitas ketika melihat isu gender dalam bencana di Bangladesh. Berdasarkan penelitian kualitatif di tingkat masyarakat dan rumah tangga, penulis berpendapat bahwa kehidupan perempuan lebih sulit dan karena itu lebih rentan dalam skenario bencana, dan aspek-aspek ini tidak dikenali atau disorot dalam perencanaan dan manajemen bencana. Dalam jurnal ini juga merekomendasikan agar perempuan dilibatkan dalam proses perencanaan darurat dan manajemen bencana dengan memastikan partisipasi aktif mereka. Masuknya lebih banyak perempuan pada profesi manajemen darurat dapat membantu dalam angka panjang untuk mengatasi risiko bencana. Sebab, pola budaya, sosial, dan ekonomi yang mendasarinya itu mengarah pada rendahnya status sosial-ekonomi perempuan dan dengan demikian menghasilkan kerentanan khusus mereka

terhadap bencana. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah bahwa pembuat kebijakan lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi masyarakat perlu lebih memperhatikan gender sifat perempuan rentan bencana untuk ditingkatkan status sosial ekonomi perempuan (Ashraf and Azad, 2015).

Kemudian dalam tulisan lain melalui jurnal yang ditulis oleh Milawaty dengan judul *Potret Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak: Studi Kasus Kekerasan Seksual pada Masa Tanggap Darurat Bencana Alam di Indonesia* (2021) memotret kekerasan seksual pada anak dan perempuan dalam bencana alam di Indonesia, faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut, serta terdapat peran yang dapat dilakukan pemerintah. Dalam jurnal ini ditemukan bahwa kekerasan yang diperoleh berupa perkosaan dan percobaan pemerkosaan, diskriminasi, pelecehan, pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan, serta usaha mengintip di kamar mandi pengungsian. Sebab-sebab yang mendorong kekerasan adalah; konstruksi bangunan yang tidak ramah gender infrastruktur, faktor norma sosial, proteksi orang tua yang menurun, keadaan ekonomi yang tidak pasti, pemberian bantuan tidak responsif gender dan peduli anak, regulasi keamanan dan keselamatan yang lemah, serta keluarga yang terpisah dari komunitas. Kerentanan terhadap kelompok anak-anak menjadi lebih besar sebab dalam jurnal tersebut dijabarkan bahwa bencana tidak lepas dari tiga hal rentan, kerentanan fisik, sosial, dan lingkungan. Milawaty juga memberikan penjabaran mengenai kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana di lokasi pengungsian, seperti pengabaian kebutuhan khusus, kekerasan rumah tangga, dan eksploitasi seksual dari pihak otoritas atau bahkan oleh sesama pengungsi. Dari yang dijelaskan sebelumnya, hal-

hal tersebut lebih banyak dirasakan oleh perempuan sebab terdapat kecenderungan bentuk kekerasan berbasis gender yang menyerang perempuan (Milawaty, 2021).

Masuk ke dalam lingkup pembahasan mengenai pembangunan setelah bencana dengan menerapkan lensa gender dalam bencana Palu-Donggala, sebagaimana yang ditulis dalam jurnal *Analisis Kerentanan Bencana Tsunami di Kota Palu* (2019) ditulis oleh Sarapang, Rogi, dan Hanny menganalisis bagaimana meminimalisir dampak bencana dengan perencanaan dan pengembangan Kota Palu yang berdasarkan sensitivitas gender. Kerentanan yang terjadi dalam aspek fisik berupa kerugian dari parameter rumah, fasilitas umum, dan fasilitas krisis. Selain kerentanan fisik juga terdapat kerentanan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam jurnal ini juga memberikan rekomendasi mengenai kebijakan mitigasi resiko ancaman tsunami berdasarkan peta kerentanan. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh para penulis terdapat rekomendasi untuk mitigasi tsunami, salah satunya berdasarkan rasio jenis kelamin sebagai faktor penentu kerentanan yakni memberikan sosialisasi terkait mitigasi bencana alam dan memberikan pemberdayaan masyarakat terhadap korban bencana, khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, dalam jurnal ini dibuktikan bahwa perempuan kurang mendapat perhatian khusus saat penanganan pasca bencana, terutama yang ditekankan dalam jurnal ini adalah sarana infrastruktur. (Sarapang, Rogi, and Hanny, 2019).

Jurnal yang ditulis oleh Rizky Alfarizy dengan judul *Penjarahan dan Kekerasan Domestik Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Sulawesi tahun 2018: Analisis General Strain Theory* (2020) memberikan penjelasan mengapa perempuan kerap mendapatkan kekerasan pasca bencana tersebut. Melalui analisisnya dengan menggunakan general strain theory, Alfarizy menyebutkan

bahwa laki-laki mendapat tekanan pasca bencana yang mendorong mereka melakukan kekerasan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, adanya tuntutan sebagai kepala keluarga, stress dan kesehatan mental yang terganggu adalah beberapa hal yang membuat mereka melakukan kekerasan dalam kondisi krisis tersebut. Bencana menjadi sumber ketegangan yang membuat mereka melampiaskan emosinya dalam bentuk kekerasan yang difasilitasi oleh beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ketegangan dapat mendorong kejahatan sebab hilangnya kontrol sosial dari diri seseorang stress dan ketegangan yang berkumpul membuat mereka menjadikan keluarganya atau individu menjadi korban (Alfarizy, 2020).

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep *gender and disaster* atau kaitannya gender dengan bencana alam dalam kasus Palu-Donggala 2018-2019.

Konsep *Gender and Disaster*

Dalam buku tersebut dengan judul *Handbook of Disaster* terdapat bagian mengenai gender dan bencana yang ditulis oleh Enarson, Fothergill, dan Peek yang menjelaskan beberapa temuan utama terkait gender dan bencana seperti ras atau etnis, kelas-kelas, pembagian kerja, hingga melibatkan politik kerja, Konsep yang akan penulis pakai dalam buku ini terdapat dalam bab *Gender and Disaster: Founding and Directions*. Menurut penulis, terdapat 6 temuan utama dalam menganalisis isu gender dan bencana, yakni kelas, ras atau etnis, kekerasan gender,

pembagian kerja, layanan pertolongan dan upaya pemulihan, dan terakhir strategi akar rumput.

Pertama, faktor kelas dalam bencana. Meskipun analisis kelas yang mendalam masih relatif jarang dalam penelitian bencana yang berfokus pada gender, namun studi yang telah dilakukan di daerah ini menunjukkan bahwa status kelas merupakan perbedaan penting dalam pengalaman bencana bagi perempuan. Perempuan berpenghasilan rendah juga cenderung tinggal di perumahan yang membuat mereka rentan, lebih sering hidup miskin daripada laki-laki berpenghasilan rendah (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 133). Kedua adalah ras atau etnis. Seperti yang diketahui, persilangan antara kemiskinan dan ras/etnis dapat digabungkan untuk merugikan perempuan. Contoh kasus yang terjadi adalah setelah banjir Grand Forks tahun 1997 di North Dakota, bantuan banjir dialihkan dari pekerja migran, terutama merugikan ibu tunggal keturunan Hispanik (Rodríguez, Quarantelli, and Dynes 2007) (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 134).

Temuan utama ketiga adalah kekerasan dalam konteks bencana alam dan kekerasan gender bahwa resiko anak perempuan dan perempuan mengalami pelecehan emosional dan kekerasan fisik meningkat pada pasca bencana pada negara berpenghasilan rendah. Seperti yang terjadi pada bencana tsunami Samudra Hindia 2004, ditemukan banyak laporan media tentang kekerasan terhadap perempuan dan eksploitasi seksual terhadap anak perempuan (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 135). Temuan utama keempat adalah faktor pembagian tugas yang juga berdampak pada perempuan karena dalam suatu bencana, peran menjadi ibu menjadi lebih sulit dan rumit karena kondisi yang tidak aman dan karena anak-anak

yang masih hidup membutuhkan lebih banyak perhatian selama dan setelah krisis menyebabkan tuntutan pada ibu untuk menjaga anak semakin berat dan terlebih lagi apabila perempuan yang kehilangan suami juga harus berperan mencari nafkah bagi keluarga (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 136).

Kemudian, konsep kelima, yakni layanan bantuan dan upaya pemulihan menunjukkan perempuan yang terlibat aktif dalam masa krisis, mengantarkan makanan dan perbekalan. Namun secara keseluruhan, terlepas dari kerja keras perempuan dalam bantuan dan pemulihan, sebagian besar penelitian menemukan bahwa perempuan tidak berada dalam posisi otoritas. Mengenai akses bantuan, kebutuhan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang perempuan seringkali terabaikan, keterbatasan hak-hak politik dan kurangnya informasi tentang hak-hak hukum yang ada menambah hambatan bagi pemulihan perempuan yang diciptakan oleh relasi gender (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 137). Temuan utama terakhir adalah strategi akar rumput perempuan sebagai upaya penguatan perempuan pasca bencana. Seperti LSM yang mengorganisir kelompok perempuan lokal sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam bantuan dan pemulihan dan membangun keterampilan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan keterlibatan mereka (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 138).

Dalam menanggapi isu gender yang terjadi pada kebencanaan, tokoh dari teori ini memberikan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Rekomendasi tersebut antara lain, memberikan fokus atau perhatian lebih kepada perempuan dan anak-anak, kritis dalam mengakui kapasitas dan kekuatan perempuan, berpikir secara global, melibatkan gender dalam politik, perempuan dan pria bekerja bersama, dan berkolaborasi dengan kelompok perempuan. Dalam 6 faktor temuan

penting seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya penulis hanya akan menggunakan 4 faktor temuan, yakni kekerasan gender yang terjadi di kamar mandi dan hunian, pembagian tugas yang ganda bagi perempuan, layanan bantuan bencana dan upaya pemulihan tanpa melibatkan partisipasi perempuan, dan strategi akar rumput untuk memberdayakan perempuan. Sementara, untuk faktor kelas dan ras atau etnis tidak memiliki parameter seperti yang terjadi pada bencana Palu-Donggala. Empat faktor temuan utama tersebut ditemukan terjadi pada studi kasus yang akan dianalisis oleh penulis dan terdapat data yang signifikan untuk dianalisis.

1.7 Argumen Sementara

Adapun argumen sementara penulis, yakni sebagai berikut:

1. Terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam penanganan bencana Palu-Donggala baik fisik maupun mental, seperti percobaan pemerkosaan dan KDRT. Perlakuan-perlakuan yang membuat perempuan menjadi pihak yang lebih dirugikan pada saat bencana yakni seperti pelecehan emosional dan kekerasan fisik yang disebabkan oleh hunian tidak aman, pembagian tugas yang tidak adil, dan lainnya.
2. Peran maupun tugas perempuan pasca bencana ini juga dapat melemahkan perempuan, sebab perempuan harus mengurus urusan domestik dan juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Dalam akses bantuan, kebutuhan jangka pendek, dan kepentingan jangka panjang perempuan seringkali terabaikan. Keikutsertaan perempuan dalam

hak-hak politik juga terbatas dan kurangnya informasi tentang hak-hak hukum.

4. Di samping adanya diskriminasi gender, perempuan juga mendapat layanan bantuan yang responsif gender dan peningkatan ekonomi perempuan. Strategi akar rumput perempuan bisa memberdayakan perempuan dan melindungi perempuan selama keadaan darurat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang akan menggunakan penelitian berbasis *library research* atau studi kepustakaan karena metode tersebut dapat menyoroti isu berdasarkan fakta-fakta untuk menggambarkan adanya isu gender pada bencana Palu-Donggala. Oleh karena itu, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengkaji pustaka melalui beberapa sumber yang terkait dengan kekerasan gender dalam bencana gempa dan tsunami Palu dan Donggala 2018.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah perempuan sebagai korban bencana Palu-Donggala 2018-2019. Sementara itu, objek penelitian ini adalah gender dan bencana dalam beberapa temuan utama terhadap bencana Palu-Donggala 2018.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan peneliti bersumber dari buku-buku elektronik, jurnal, artikel, dokumen resmi, serta media *online*. Penulis juga mengutip pernyataan-pernyataan aktor pemerintah maupun non-pemerintah melalui artikel *online*. Penelitian ini akan berbasis studi pustaka, oleh karena itu maka yang akan digunakan adalah data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian akan diolah dengan menggunakan konsep gender dan bencana yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Proses Proses dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah dan bertahap. Diawali dengan merancang penelitian dan pengumpulan data. Kemudian tahap selanjutnya adalah penulis menganalisis terkait dengan permasalahan yang ditemukan serta mencari solusi, sehingga penelitian ini mendapat hasil untuk menjawab rumusan masalah. Tahap terakhir adalah penulis memaparkan hasil penelitian untuk diuji.

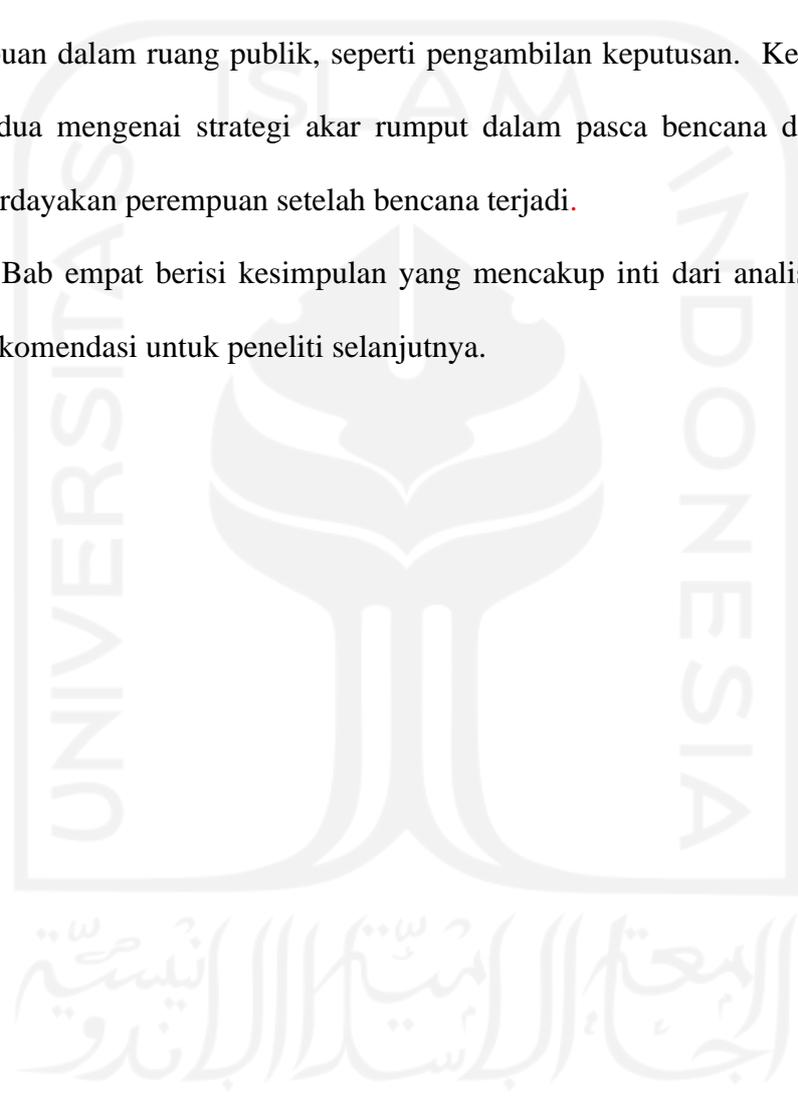
1.9 **Sistematika Pembahasan**

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, dan metode penelitian yang terbagi menjadi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan proses pengumpulan data.

Bab dua mengenai isu kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan pasca bencana alam Palu-Donggala dan menjelaskan peran ganda atau tugas yang didapat oleh perempuan.

Bab tiga juga terbagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas layanan bantuan bencana dan upaya pemulihan yang juga meliputi kurangnya peran perempuan dalam ruang publik, seperti pengambilan keputusan. Kemudian, sub-bab kedua mengenai strategi akar rumput dalam pasca bencana dengan tujuan memberdayakan perempuan setelah bencana terjadi.

Bab empat berisi kesimpulan yang mencakup inti dari analisis penelitian serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERAN PEREMPUAN PASCA BENCANA PALU-DONGGALA 2018

Dalam bab ini penulis akan membagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai kekerasan gender yang menimpa perempuan dalam bencana alam yang terjadi di Palu dan Donggala tahun 2018. Kemudian, sub bab kedua menjelaskan mengenai ketimpangan pembagian tugas dan peran perempuan pada pasca bencana.

2.1. Kekerasan Gender Pasca Bencana Palu-Donggala

Risiko anak perempuan dan perempuan mengalami pelecehan emosional dan kekerasan fisik meningkat setelah bencana di negara-negara berpenghasilan rendah telah didokumentasikan dengan baik oleh lembaga bantuan kemanusiaan dan responden lain (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 134). Beberapa contoh bencana yang pernah terjadi di dunia dan terdapat hubungan gender di dalamnya yakni pada bencana banjir Kamboja perempuan khawatir tentang risiko pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap putri mereka yang terpaksa bermigrasi untuk mencari pekerjaan sebagai strategi pembayaran hutang. Selain itu, pada keluarga yang terdampak Badai Mitch menghadapi banyak masalah termasuk peningkatan konflik keluarga dan pelecehan yang dapat dijelaskan sebagian sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari praktik banyak lembaga bantuan eksternal yang menargetkan perempuan dalam program bantuan (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 135).

Selain itu, menyusul tsunami Samudra Hindia 2004, ada banyak laporan media tentang kekerasan terhadap perempuan dan eksploitasi seksual terhadap anak

perempuan. Selanjutnya mengenai kasus KDRT bagaimana persepsi personel organisasi terhadap isu KDRT sebelum bencana sangat mempengaruhi persepsi dan penanganan isu KDRT pascabencana. Terdapat ketidaksetaraan dalam keterpaparan terhadap risiko serta dalam akses ke sumber daya, kemampuan, dan peluang yang dapat merugikan kelompok orang tertentu, sehingga menjadikan mereka lebih rentan terhadap dampak bencana alam. Dampak bencana alam terhadap perempuan lebih menurunkan kemampuan mereka dalam melanjutkan hidup. Kesenjangan gender yang kuat pada penanganan pasca bencana mendorong laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual, fisik, maupun mental. Norma sosial dan perilaku peran dapat menyebabkan perempuan mendapat kekerasan lebih tinggi selama penanganan bencana. Bencana dapat menyebabkan kurangnya sumber daya kebutuhan dasar serta kerusakan sementara dalam tatanan sosial (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 132).

Disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena merujuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat (Kango, 2009). Kekerasan terhadap perempuan dapat menyebabkan masalah kesehatan, melemahkan posisi perempuan, membahayakan fisik, serta mengikis harga diri mereka (Purwanti, 2020). Berbicara mengenai kekerasan, terutama terhadap perempuan, dapat dibagi menjadi dua bentuk. Pertama dalam bentuk kekerasan fisik yang dapat berupa bentuk kekerasan yang dapat memberi korban penderitaan fisik, seperti memukul dan pemerkosaan. Kedua adalah non-fisik yang dapat berupa merayu, berkata jorok, dan menatap. Bencana sendiri memiliki dampak dasar, yakni dampak yang diakibatkan oleh peristiwa faktor alam maupun dampak oleh faktor manusia yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun materil. Faktor yang

diakibatkan oleh manusia juga dapat mengancam atau mengganggu keberlangsungan hidup dan fungsi manusia. Masa penanganan pasca bencana pun tidak luput dari adanya kekerasan berbasis gender. Posisi perempuan yang lemah, keadaan yang darurat, tekanan lebih besar, serta runtuhnya layanan dan infrastruktur dapat meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (Purwanti, 2020). Oleh karena itu memperhatikan perbedaan gender dibutuhkan dalam melakukan mitigasi bencana. Perbedaan-perbedaan kondisi yang dialami perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh aspek biologis dan kultur-sosial (Anisa and Santoso 2020).

Norma sosial dan perilaku peran dapat menyebabkan perempuan mendapat kerentanan lebih tinggi selama penanganan bencana, salah satunya adalah munculnya kekerasan-kekerasan yang cenderung diarahkan kepada perempuan dan anak perempuan. Dalam bencana alam Palu-Donggala terdapat beberapa kekerasan yang terjadi, seperti perkosaan dan percobaan pemerkosaan, diskriminasi, pelecehan, pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan, serta usaha mengintip di kamar mandi pengungsian (Milawaty, 2021). Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah, Bambang Suwandi, mengatakan “Ada 230 kasus secara fisik, psikis 99 kasus, seksual 153 kasus, yang lain adalah penelantaran anak 28, eksploitasi dan *trafficking* masing-masing 1 kasus dan ada 16 kasus lainnya” (Natalia, 2019).

Di Sulawesi Tengah sendiri terdapat suku bernama suku Kaili, di mana suku tersebut menempatkan perempuan sebagai gender yang memiliki tugas hanya di dalam rumah. Mereka tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya tanpa memakai dua helai kain. Perempuan suku Kaili semasa remaja hanya dikurung di dalam

rumahnya. Perempuan yang hanya bekerja di dalam rumah membenarkan bahwa perempuan mempunyai sifat lemah dan dapat merendahkan kedudukan kaum wanita sebagai pribadi manusia (Aminah, 2011). Upaya pemerkosaan terjadi pada perempuan yang hendak membuang air kecil di toilet tenda pengungsian di area Masjid Agung Palu (Idham 2021). Akibat toilet yang gelap dan mencampur antara perempuan dan laki-laki, sekat yang rendah, jarak antara toilet dan tenda yang cukup jauh, ada pula yang pintunya rusak, serta tidak adanya fasilitas keamanan. Selain itu, tenda pengungsian yang gelap, yang tipis dan kecil sehingga tidak ada ruang untuk privasi, dan terdiri dari banyak orang sebab dihuni lebih dari satu keluarga juga memicu upaya percobaan pemerkosaan. Bukan hanya terjadi di tenda pengungsian, setelah pindah ke hunian sementara (huntara) tidak menutup tindakan kekerasan yang berbasis gender. Orang asing masih bisa bebas keluar masuk area hunian yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan sebab hunian sementara tidak memiliki standar keamanan bagi penghuninya. Dalam konferensi pers dua tahun pasca bencana di kantor KPKP-ST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah), Soraya menyampaikan “Disamping itu, desain huntara yang tanpa sekat di dalamnya akhirnya menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, incet, hingga pemerkosaan” (Idham 2021). Jumlah angka laporan peningkatan kasus perkawinan anak juga meningkat setelah para pengungsi pindah ke hunian sementara.

Selain itu, kekerasan yang dirasakan oleh perempuan adalah perkawinan anak. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya kontrol orang tua saat di tenda maupun huntara, hubungan seks yang berakibat pada hamil diluar nikah, serta adanya kesempatan. Sementara, untuk tingginya angka perkawinan anak

dikarenakan ketidakadilan gender yang di mana anak perempuan terpaksa harus menikah untuk meringankan beban orang tua, kemudian akibat dari kemiskinan akan hilangnya akses terhadap sumber mata pencaharian, tidak ada tempat tinggal, maupun hilangnya harta benda yang dapat menjadi modal ekonomi, hingga emosi yang tidak terkontrol.

Orang tua lemah terhadap kontrol kepada anak mereka karena mereka fokus dalam mencari nafkah alternatif. Nasib dari anak perempuan yang terpaksa menikah akhirnya harus dikeluarkan dari sekolah dan berpengaruh terhadap psikologis anak. Terdapat kasus pemerkosaan yang tidak berlanjut karena pihak keluarga mencabut laporan. Pertimbangan mereka adalah karena perilaku kekerasan adalah ayah tiri korban yang menjadi tulang punggung keluarga (Tamrin, 2019). Tempat pengungsian tidak tersedia ruang privat yang memadai untuk aktivitas privasi para penyintas perempuan karena pembangunan hunian sementara tidak terlalu memperhatikan aspek keseharian perempuan. Tim Pekerja Sosial pada bencana ini juga membenarkan di bawah Dinas Sosial bahwa banyak ibu menyusui yang kesulitan memberikan ASI kepada bayinya pasca bencana (Kurniawan, Maarif, and Rahardi, 2021). Sehingga tidak ada pilihan bagi mereka kecuali memberikan susu formula untuk menghindari bayinya kelaparan

Kasus kekerasan terhadap perempuan adalah wabah yang ada di tenda pengungsian maupun hunian sementara. Kamar mandi adalah tempat yang paling tersorot pada hunian sementara sebagai tempat kekerasan terjadi. Bentuk kamar mandi gandeng membuat perempuan rentan menjadi korban pelecehan seksual dan selalu khawatir jika kerap menggunakan kamar mandi. Kekerasan fisik kepada pasangan terjadi karena bentuk hunian sementara yang kecil, tanpa sekat, dan

bersambung dengan penghuni lain membuat pasangan suami istri tidak bisa melakukan pemenuhan biologis.

Kondisi tegang pasca bencana Palu-Donggala juga memunculkan kekerasan kepada perempuan dalam bentuk KDRT. Perempuan bercerai karena suaminya telah melakukan kekerasan fisik dan seksual serta tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Banyaknya anak yang menjadi beban ekonomi keluarga juga berdampak pada masalah beban psikologis. Kekerasan pasangan tersebut dilakukan oleh suami karena merasa frustrasi, selain itu suami tidak punya pekerjaan tetap dan kebebasan terbatas karena ikut mertua (Sitti, et al 2021). Menurut laporan UNFPA 2019, sebanyak 14 persen perempuan dari responden survei mengaku mengalami KDRT (Amellya, 2022). Hal tersebut diakibatkan oleh tidak bisa melakukan hubungan seksual karena hunian sementara yang dihuni oleh lebih dari 1 keluarga dan terdapat kejadian di mana sang istri tidak nyaman karena lampu menyala dan menghormati kakaknya yang sedang berkunjung, namun berujung dengan KDRT. Menurut Soraya Sultan, Ketua KPKP-ST, kasus yang paling tersorot pada fase pemulihan adalah KDRT. Soraya Sultan mengatakan “KDRT kini sudah mulai naik ratingnya dibanding pelecehan seksual. Dulu awal bencana pelecehan seksual ratingnya di posisi pertama, tapi sekarang terbalik” (Lidiawati, n.d.). Selain itu, kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan kurang mendapat sensitivitas, seperti bagi ibu hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Oleh karena itu, komnas perempuan menyerukan untuk memperhatikan kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan (Mazrieva, 2018).

Setelah bencana, kurangnya perawatan kesehatan dan sanitasi di lingkungan hunian sementara juga berdampak pada kesehatan seksual dan reproduksi

perempuan. Kesulitan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual. Masalah ekonomi membuat keluarga miskin memprioritaskan anak laki-laki mereka yang melanjutkan sekolah (CARE Rapid Gender, 2018). Sementara, anak perempuan diharuskan tinggal di rumah karena tidak mampu untuk membiayai sekolah.

Fenomena bencana Palu-Donggala ini memperkuat temuan beberapa penelitian terkait relasi gender dan bencana di berbagai negara yang menyimpulkan bahwa kekerasan berbasis gender cenderung meningkat pasca bencana alam. Dari penjelasan dan data-data di atas cukup jelas bahwa terjadi berbagai kekerasan gender, seperti fisik dan seksual. Fenomena yang terjadi pada perempuan korban Palu-Donggala adalah percobaan pemerkosaan, perkawinan anak, dan trafficking, KDRT, serta pengabaian kebutuhan khusus perempuan.

Hal tersebut sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Enarson sebelumnya terkait gender dan bencana, di mana adanya bencana alam dapat meningkatkan potensi kekerasan gender, baik fisik dan mental. Seperti contoh yang diberikan oleh Enarson dalam bencana banjir Kamboja terjadi kekerasan gender berupa perempuan khawatir tentang risiko pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap putri mereka yang terpaksa bermigrasi untuk mencari pekerjaan sebagai strategi pembayaran hutang (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 135). Kekerasan yang terjadi dalam banjir Kamboja tersebut juga terjadi pada bencana alam Palu-Donggala. Oleh karena itu, konsep gender dan bencana serta contoh yang diberikan oleh Enarson cocok untuk isu kekerasan gender di Palu-Donggala.

2.2. Peran Perempuan Pasca Bencana Palu Donggala

Berdasarkan pembagian peran kerja perempuan yang beragam yang melibatkan tenaga kerja produktif, reproduktif, dan komunitas, pakar gender bencana telah menganalisis bagaimana pembagian kerja di rumah, terutama terkait peran dan tanggung jawab pengasuhan dapat meningkatkan kerentanan pada perempuan sebelum bencana dan pada fase pemulihan dengan menjadi beban tambahan pada perempuan (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 135). Tenaga kerja wanita sering membantu keluarga mereka untuk mempersiapkan dan mengatasi peristiwa bencana. Beberapa peneliti berpendapat bahwa wanitalah yang menyatukan keluarga mereka setelah bencana.

Di sebagian besar masyarakat, tanggung jawab sehari-hari dan langsung untuk mengasuh dan merawat tanggungan adalah pekerjaan perempuan. Selain itu, dalam hal evakuasi, perempuan bertanggung jawab untuk menciptakan dan menciptakan kembali rasa aman bagi anak-anak dalam rangkaian yang sering terjadi. Oleh karena itu, pekerjaan perempuan dalam bencana menjadi semakin penting sebagai bagian dari “giliran kedua” pekerjaan rumah tangga (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 136). Secara umum, wanita sering menganggap peringatan risiko lebih kredibel dan menindaklanjuti pengetahuan ini dengan mengambil tindakan perlindungan untuk diri mereka sendiri dan anggota keluarga mereka.

Seperti yang terjadi setelah Badai Mitch, pekerjaan rumah tangga perempuan berkembang pesat sebagai akibat desersi laki-laki dan/atau keharusan migrasi ekonomi. Dalam suatu bencana, peran ibu menjadi lebih sulit dan rumit karena kondisi menjadi tidak aman dan karena anak-anak yang masih hidup membutuhkan lebih banyak perhatian selama dan setelah krisis. Selain itu, sebuah

studi di Kamboja menemukan bahwa perempuan, sebagai penyedia kesehatan dan pengasuhan anak dalam keluarga, berada di bawah tekanan besar karena mereka merasa harus mengawasi anak-anak kecil sambil juga melaksanakan tanggung jawab pekerjaan penting lainnya dalam bencana banjir (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 136).

Perempuan yang secara ekonomi terkena dampak bencana harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena usaha yang sebelumnya dikelola bersama dengan suaminya harus ditutup baik karena kerusakan gempa atau tidak lagi memiliki pelanggan. Beberapa wanita kehilangan suami mereka dan ini merupakan disinsentif untuk membuka usaha lagi, sementara untuk memulai kembali usaha baru, mereka terkendala oleh kurangnya akses ke modal usaha meskipun beberapa dari mereka sekarang menjual kue dan makanan. Keadaan ini tentunya berdampak pada pendapatan keluarga sehingga secara sosial perempuan harus memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Hal ini juga terjadi pada perempuan korban bencana Palu-Donggala. Perempuan memiliki beban ganda, terutama bagi perempuan yang telah kehilangan suaminya. Mereka harus bertanggung jawab atas dua hal, yakni urusan domestik yaitu dalam rumah tangga seperti mengurus keluarga yang sakit atau mengawasi anak mereka, dan juga harus mencari uang untuk menghidupi keluarga (Adda, Nantes, and Buntuang, 2021). Peran perempuan pasca bencana mengalami pergeseran yang substantif. Perempuan yang secara ekonomi terkena dampak bencana harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena usaha yang sebelumnya dikelola bersama dengan suaminya harus ditutup baik karena kerusakan gempa atau tidak lagi memiliki pelanggan.

Wanita yang kehilangan suaminya berupaya untuk membuka usaha baru demi mencari pekerjaan, sementara untuk memulai kembali usaha baru, mereka terkendala oleh kurangnya akses ke modal usaha meskipun beberapa dari mereka sekarang menjual kue dan makanan. Di samping itu, pekerjaan lelaki yang lebih banyak bergantung pada kekayaan alam juga lumpuh akibat bencana gempa dan tsunami, seperti kegiatan mencari ikan, bertani, dan beternak (Kurniawan, Maarif, and Rahardi, 2021). Keadaan ini tentunya berdampak pada pendapatan keluarga sehingga secara sosial perempuan dalam penelitian ini tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan untuk bersosialisasi karena fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Saat ini banyak perempuan yang harus mengambil peran sebagai kepala keluarga. Dari hasil dua puluh orang, semuanya adalah perempuan yang terkena dampak langsung bencana yang sebelumnya pernah mengelola usaha (Adda, Nantes, and Buntuang, 2021) mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena tidak memiliki kontak atau jaringan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa perempuan, memprakarsai kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka bekerja sebagian besar dari rumah. Oleh karena itu, perempuan harus bisa memenuhi peran sosial ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh suami mereka. Selain itu, dalam urusan rumah tangga perempuan korban bencana ini harus bisa memenuhi harapan mereka sendiri dan harapan orang lain untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memiliki kekuatan dan sumber daya.

Peran dan tugas perempuan bukan hanya dalam persoalan ekonomi keluarga, melainkan harus bertanggung jawab bagi keluarga. Perempuan bencana

Palu-Donggala dalam rumah tangga yang bertindak sebagai 'peredam kejut' untuk keluarga dengan mengurangi makanan jatah pemasukan makanan mereka sendiri (“Gender and Inclusion Alert” 2018). Karena perempuan memainkan peran besar dalam mengelola makanan dalam rumah tangga, dan memikul tanggung jawab untuk pengadaan dan penyiapan makanan, tingkat kekerasan juga terjadi dari dengan hal ini. Tingkat ketahanan pangan dan risiko kekerasan gender terkait erat dengan kekurangan pangan yang dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga dan mengarah pada kekerasan pasangan intim.

Dari responden-responden perempuan yang ada di komunitas Palu, beberapa di antara mereka mengatakan: “Ibu memilikinya dua kali lipat, pekerjaan mereka ganda”. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa biasanya laki-laki yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, kini mereka kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Sehingga, perempuan termasuk para ibu harus turun tangan dalam mencari uang. Mereka perlu memikirkan makanan bagi anak-anaknya setiap hari dan memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Responden lain yang berada di komunitas Palu mengatakan: “Sebelum bencana, saya hanya di rumah mengurus anak dan tidak pernah beraktivitas di luar rumah. Sekarang saya berpartisipasi dalam kegiatan mata pencaharian” (“Leading The Way 2019).

Dari ucapan para responden tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan, khususnya seorang ibu mendapat peran rangkap setelah bencana Palu-Donggala terjadi (“Leading the Way” 2019). Peran ganda yang mereka dapatkan adalah pertama sebagai ibu yang harus mengurus rumah tangga layaknya sebelum bencana terjadi dan juga setelah bencana. Peran gender tradisional di Sulawesi

memposisikan perempuan sebagai penanggung jawab pekerjaan rumah tangga dan mengurus anggota keluarga. Hal ini termasuk mengumpulkan air jika perlu, menyediakan makanan dan memasak, dan mengurus anak.

Keadaan krisis yang terjadi akibat bencana maupun respons kemanusiaan yang timbul dari penghancuran sebagian atau seluruhnya fasilitas WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) dan kebun pangan, sebagai penjaga utama bagi kesehatan keluarga, pengasuh anak-anak, dan anggota keluarga tanggungan lainnya. Akibatnya, perempuan kemungkinan akan menghadapi peningkatan lebih lanjut dalam beban kerja mereka. Bagi perempuan penyintas bencana ini mereka harus memikirkan keluarga dan mencari nafkah, sementara dalam mencari mata pencaharian pun mereka kesulitan.

Ketimpangan pembagian tugas atau peran perempuan pada fase pasca bencana Palu-Donggala sesuai dengan faktor pembagian tugas dan peran sebagai salah satu temuan utama dalam konsep gender dan bencana yang dijelaskan oleh Enarson dan kawan-kawan (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 136). Bahwa, bencana tidak berdampak adil pada setiap gender. Dijelaskan bahwa perempuan harus mengemban beban ganda setelah bencana dengan menjadi sosok ibu atau anak perempuan yang harus mengurus urusan rumah tangga. Selain itu, mereka juga berperan dalam mencari nafkah demi menghidupi kebutuhan keluarga. Terlebih lagi dalam bencana Palu-Donggala seorang ibu juga harus merelakan jatah asupan makan mereka untuk diberikan kepada anak-anak mereka atau keluarga yang lebih membutuhkan.

BAB III

**PARTISIPASI PEREMPUAN PASCA BENCANA PALU-
DONGGALA DI RUANG PUBLIK DAN STRATEGI AKAR RUMPUT**

Pada bab 3 ini penulis akan membagi menjadi dua sub-bab, yakni temuan utama ketiga dan keempat. Sub bab pertama membahas mengenai partisipasi perempuan yang kurang dalam ruang publik seperti pengambilan suara atau saat membuat keputusan. Sub-bab kedua akan membahas mengenai strategi akar rumput perempuan pasca bencana sebagai upaya penguatan dan pemberdayaan perempuan.

3.1. Kurangnya Partisipasi Perempuan di Ruang Publik Pasca Bencana Palu-Donggala

Penelitian menunjukkan bahwa gender memiliki keterkaitan dalam memahami siapa yang membantu pelayanan pasca bencana dan upaya pemulihan. perempuan seringkali terlibat aktif dalam periode krisis seperti mengantarkan makanan dan perbekalan lainnya. Namun secara keseluruhan, terlepas dari kerja keras perempuan dalam bantuan dan pemulihan, sebagian besar penelitian menemukan bahwa perempuan tidak berada dalam posisi otoritas (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 137). Sebuah survei mengenai peran perempuan dalam penanggulangan bencana di Karibia menunjukkan bahwa perempuan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan, tetapi tidak dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.

Hal ini juga ditemukan di Bangladesh, di mana perempuan tidak diikutsertakan dalam kegiatan pengambilan keputusan tanggap bencana, diberi pasokan bantuan yang lebih sedikit, dan tidak dipercaya dengan tugas tanggap. Mengenai akses untuk membantu, kebutuhan jangka pendek dan kepentingan

jangka panjang perempuan seringkali diabaikan. Keterbatasan hak-hak politik dan kurangnya informasi tentang hak-hak hukum yang ada menambah hambatan bagi pemulihan perempuan yang diciptakan oleh hubungan gender dan bencana, seperti yang diilustrasikan dalam laporan dari Bangladesh setelah angin topan (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 137). Upaya bantuan yang dilakukan tanpa pengetahuan tentang hambatan budaya untuk kelompok perempuan tertentu dan tanpa staf perempuan yang kompeten secara budaya tidak dapat membantu masyarakat secara adil (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 138).

Minimnya kesempatan perempuan menjadi pemimpin dalam pengungsian seringkali menghambat terdengarnya suara perempuan, sehingga kebutuhan perempuan tidak selalu menjadi pemenuhan utama. Kesempatan untuk hadir dan tampil berbicara dalam pertemuan internal di dalam komunitas pengungsi, maupun pertemuan dengan stakeholder lain di tempat pengungsian banyak diwakili oleh laki-laki. Faktor kultural juga memiliki dampak dalam penglibatan perempuan pada aktivitas-aktivitas mitigasi bencana (Nuriana, Rusyidi, and Fedryansyah, 2019). Selain itu, perempuan butuh untuk memastikan adanya kesetaraan gender dalam penanganan bencana dengan mempromosikan perempuan untuk semakin terlibat dalam peran, seperti manajemen kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan mengakui posisi perempuan dalam masyarakat yang luas (Enarson and Chakrabarti, 2009).

Dalam situasi darurat pasca bencana, perbedaan pengaruh laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perbedaan akses atas pengetahuan menimbulkan perempuan lebih rentan terkait bencana. Nilai dimana laki-laki harus melindungi keluarga dengan mengesampingkan peran perempuan atau keberadaan

perempuan. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa perempuan bila diberi kesempatan dapat berperan aktif dan efektif untuk menggerakkan masyarakat dalam menghadapi bencana. Namun, nilai terhadap peran laki-laki dan dominasi mereka menyebabkan keterlibatan perempuan dalam ruang publik dikesampingkan (Saito, 2012).

Realita yang terjadi pada perempuan di Sulawesi Tengah ditempatkan pada posisi marginal dibandingkan dengan laki-laki, baik pada posisi eksekutif maupun legislatif. Sehingga, hal tersebut membuat perempuan harus selalu berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat dan warga bangsa. Dari suatu jurnal ditemukan pada dua instansi pemerintah, yakni kantor Gubernur Sulawesi Tengah (perwakilan lembaga eksekutif) dan Kantor Sekretariat DPR Provinsi Sulawesi Tengah (perwakilan lembaga legislatif) memperlihatkan bahwa peran dan posisi perempuan belum menjamin hak-hak mereka untuk memiliki peran strategis di bidang politik dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perempuan pada kedua Lembaga tersebut tidak mencerminkan adanya kesetaraan gender (Wahab 2008). Keterwakilan politik perempuan di DPRD Sulawesi Tengah masih rendah yang tercermin dari tidak terpenuhinya kuota 30% untuk calon anggota legislative. Faktor hambatan budaya dan structural mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD. Budaya patriarki dan stereotip negatif yang ada pada perempuan turut mendorong hambatan budaya (Singgani 2007).

Selain pada kedudukan di pemerintahan, kurangnya partisipasi perempuan juga ditunjukkan pada perempuan bencana Palu-Donggala. Berdasarkan jurnal, orang-orang yang diwawancarai untuk penelitian dalam jurnal tersebut menyoroti bahwa meskipun sebagian besar organisasi pelaksana yang mengerjakan respons

memiliki jumlah perempuan yang relatif tinggi untuk mewakili kontingen staf mereka, namun perempuan cenderung menduduki lebih banyak peran administratif dan manajemen menengah ke bawah, dengan hanya beberapa perempuan dalam tim manajemen senior ("Leading The Way" 2019).

Selain itu, orang yang diwawancarai untuk penelitian ini mengidentifikasi kekurangan yang signifikan dari perempuan dan organisasi yang dipimpin perempuan yang terwakili dalam struktur klaster selama tahap awal respons. Untuk sejumlah kecil organisasi yang menghadiri pertemuan ini termasuk di tingkat sub-cluster, terutama mengenai kekerasan berbasis gender beberapa berhenti hadir karena merasa masukan mereka tidak diakomodasi atau dihargai.

Kurangnya representasi ini terlihat berdampak negatif pada sejauh mana perempuan dan kebutuhan serta prioritas anak perempuan tercukupi. Terdapat perbedaan penting dalam hal ini, yakni faktor geografis yang menemukan Palu dan Sigi terlihat jauh lebih maju dibandingkan Donggala. Selain itu, kekuasaan patriarki dan elit masih dapat beredar di ruang-ruang informal yang tidak dilihat sebagai pengganti suara perempuan yang terwakili dalam ruang formal. Berdasarkan salah satu perempuan dalam organisasi yang dipimpin perempuan berkata "Organisasi kami tidak terlihat membawa banyak bantuan ke cluster. Di dalam diskusi cluster, perempuan tidak dianggap penting dan diremehkan. Dalam diskusi tentang penanganan kelompok rentan, kami jarang terlibat" ("Leading The Way" 2019).

Jika suara, perspektif, dan keterampilan perempuan tidak diprioritaskan dalam pembangunan kemanusiaan dan ruang pengambilan keputusan, masalah mereka cenderung tidak dipahami dan ditanggapi. Sehingga, kerentanan dan ketidaksetaraan yang ada akan semakin kuat. Selain itu, hal ini juga mengenai

bergerak lebih dari sekedar diberikan akses untuk berpartisipasi, namun juga untuk memperkuat peluang dalam berpengaruh.

Dalam penemuan lain di sumber yang sama juga ditemukan sejumlah besar kamp dikelola oleh pihak yang berkuasa laki-laki dari desa. Mereka menjaga koneksi mereka. Seorang kepala desa laki-laki memiliki tiga tenda besar dan tinggal di tenda lain di desa lain. Selain itu, pertemuan kamp yang dilakukan setiap tiga hari, diselenggarakan dan dipimpin oleh laki-laki tanpa partisipasi perempuan. Wanita lokal yang dipimpin oleh organisasi wanita memiliki beragam keterampilan, pengetahuan, dan jaringan yang merupakan aset yang sangat besar dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan kemanusiaan kerja. Namun, kurangnya 'keahlian kemanusiaan' dan kapasitas operasional menjadi tantangan yang membatasi mereka untuk terlibat penuh.

Memprioritaskan perempuan kepemimpinan pada dasarnya adalah sesuatu yang perlu dilakukan karena perempuan dapat berkontribusi pada keputusan yang bisa mempengaruhi dan berdampak banyak pada kehidupan mereka. Kehadiran perempuan dalam bencana dapat alam menyiapkan dan mengelola ruang aman (termasuk Ruang Ramah Wanita dan Tenda Ramah Wanita), memberikan layanan psikososial dan penyembuhan trauma. Perempuan pada bencana ini mereka juga memainkan peran kunci dalam membesarkan profil, dan mengadvokasi, perhatian utama dengan otoritas lokal dan lembaga pelaksana. Namun disayangkan dalam dunia bantuan kemanusiaan yang patriarkal dan didominasi laki-laki, kebutuhan dan hak perempuan dapat dan seringkali diabaikan dan tidak mendapat prioritas. Hal ini menjadi bermasalah karena tidak mempertimbangkan dampak yang proporsional yang sering dialami oleh perempuan dan anak perempuan selama

keadaan darurat kemanusiaan seperti pada kondisi pasca bencana. Sebagian besar perempuan masih kurang terwakili dalam struktur pengambilan keputusan kemanusiaan formal, mekanisme koordinasi, dan kebutuhan perempuan serta anak perempuan sebagian besar masih belum terpenuhi dalam bantuan kemanusiaan.

Perempuan korban bencana Palu-Donggala terbukti tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan tidak mendapat informasi yang baik dalam hal penanganan bencana, oleh karenanya perempuan disana tidak dapat bertindak menyelamatkan diri mereka sendiri. Hal ini kaitannya dengan penentuan 'zona merah' dan kondisi hunian sementara, dimana perempuan mengungkapkan rasa frustrasi karena suara dan perspektif mereka tidak dipertimbangkan ("Leading The Way" 2019). Berdasarkan narasumber, perlu menekankan pentingnya perempuan dalam menentukan arah kebijakan bagi BNPB (tingkat nasional) dan BPBD (tingkat provinsi)

Kurangnya partisipasi perempuan di ruang publik pada bencana Palu-Donggala ini memiliki kesamaan dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya terkait relasi gender dan bencana di berbagai negara yang menyimpulkan bahwa partisipasi atau kehadiran perempuan di ruang publik setelah bencana masih dikesampingkan, yang di mana mereka juga dapat menjadi pembuat keputusan terkait fase pemulihan bencana atau hal yang berkaitan antara perempuan dan bencana. Dari penjelasan dan data-data diatas cukup jelas bahwa perempuan kurang mendapat ruang untuk bersuara karena beberapa hal, yakni, mereka tidak diakomodasi atau dihargai, masih adanya budaya tradisional patriarki, kurangnya 'keahlian kemanusiaan' atau kurang terampil dan kapasitas operasional, serta

meskipun mereka dilibatkan namun hanya sebagai peran administratif dan manajemen menengah ke bawah.

Hal tersebut sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Enarson sebelumnya terkait gender dan bencana, di mana perempuan yang seringkali menjadi gender yang lebih terdampak akibat bencana juga harus merasakan yang terancam akibat bencana masih dapat mengelola risiko dan menanggapi bencana dengan baik. Seperti contoh yang diberikan oleh Enarson dalam bencana di Karibia yang menunjukkan bahwa perempuan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan, tetapi tidak dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 138). Kurangnya partisipasi perempuan dalam hal ini juga terjadi pada perempuan korban bencana alam Palu-Donggala. Oleh karena itu, konsep gender dan bencana serta contoh yang diberikan oleh Enarson sejalan dengan masalah perempuan dalam keterlibatan di ruang publik pada pasca bencana Palu-Donggala.

3.2. Strategi Akar Rumput Perempuan Pasca Bencana Palu-Donggala

Meskipun sering dikecualikan dari jalan yang lebih resmi, terdapat bukti bahwa perempuan dapat mengorganisir di tingkat akar rumput untuk mengelola risiko dan menanggapi bencana (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 138). Salah satu alasannya adalah perempuan sebagai pengguna utama dan pengelola sumber daya alam yang terancam di negara berkembang, berorganisasi dengan perempuan lain seputar masalah lingkungan dan kesehatan. Seperti di Amerika Serikat, menemukan bahwa perempuan aktif dalam kelompok akar rumput mengatasi bahaya lingkungan seringkali sebagai hasil dari jaringan pertemanan perempuan

mereka dan seringkali terlepas dari pejabat yang menganggap mereka tidak mampu atau tidak kompeten.

Contoh lain di Miami setelah Badai Andrew, terdapat hasil yang tidak terduga dari bencana besar juga merupakan peningkatan rasa kemanjuran politik dan pemberdayaan pribadi bagi perempuan (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 138). Koalisi feminis akar rumput bekerja untuk menyatukan perempuan dalam proses pembangunan kembali dan mendukung rencana pemulihan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Hal ini juga terjadi pada gempa bumi di India dan Turki pada 1990-an di mana LSM mengorganisir kelompok perempuan lokal sehingga perempuan dapat berpartisipasi dalam bantuan dan pemulihan dan membangun keterampilan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan keterlibatan mereka. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh tingkat kepercayaan baru karena merasa mampu terlibat dalam urusan publik.

Berdasarkan konsep gender dan bencana oleh Enarson, Fothergill, dan Peek bahwa perempuan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dan membangkitkan perempuan dengan memberdayakannya setelah bencana. Hal itu pun terjadi pada kasus perempuan bencana Palu-Donggala. Beberapa aktor yang terlibat seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, serta aktivis-aktivis NGO pegiat perlindungan perempuan turut serta dalam membantu perempuan untuk lebih berdaya pasca bencana.

Perempuan memiliki potensi dalam mengambil peran penting pada masa penanggulangan bencana. Deputi Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi menyampaikan bahwa kelompok perempuan juga harus mendapatkan kesempatan

yang sama dalam hal kesetaraan akses, kapabilitas, akses ke sumber daya, serta peluang yang setara (Ariansyah, 2022). Perempuan Palu harus bangkit dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI menggandeng lembaga profesi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk membantu hal tersebut. Untuk merealisasikan hal ini dilakukan kegiatan bertema ‘Palu Pulih’ di hunian sementara untuk kesejahteraan perempuan dan anak pasca bencana.

Munculnya berbagai masalah sosial yang merugikan perempuan seperti kekerasan fisik dan seksual, rentannya perempuan terkena penyakit reproduksi, serta sanitasi yang belum terpisah dengan laki-laki mendorong Kemen PPPA untuk membangun kembali harapan perempuan pasca bencana sebagai pemberdayaan perempuan. Kegiatan Palu Pulih memberikan bermacam pelayanan atau konseling bagi masyarakat korban bencana dalam bidang kesehatan dan hukum, dalam bentuk mini workshop mengenai isu kesehatan, sosial, dan hukum. Terdapat pula pelayanan lain seperti pelatihan ekonomi perempuan yang melakukan kegiatan memasak bersama dan keterampilan perempuan lainnya. Untuk program anak-anak diberikan layanan pendidikan yakni menggambar, mewarnai, mendongeng, dan mengisi pohon harapan. Lembaga profesi dan dunia usaha juga turut terlibat dalam kegiatan tersebut, diantaranya Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak (FROSAPENA) dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

Susi Andriani, Wakil Ketua II DPP mengatakan mereka memberi bantuan berupa pengembangan usaha mikro bertujuan agar perempuan bisa mandiri dan memulihkan ekonomi korban bencana (Arshandi and Ridwan, 2019). “Bantuan itu

berupa dana dan peralatan pendukung sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing penerima manfaat” ujar Susi. Selain IWAPI, DP3A Sulawesi Tengah juga memberikan keterampilan bagi perempuan korban bencana di lokasi pengungsian. Untuk memenuhi dan melindungi hak-hak perempuan pasca bencana, DP3A melakukan kegiatan untuk pengembangan usaha ekonomi dengan melibatkan kelompok atau organisasi demi mengoptimalkan pemberdayaan perempuan. Melalui aktivitas di Tenda Ramah Perempuan (TRP) para perempuan dapat berdiskusi mengenai berbagai hal. Seperti masalah ekonomi, kesehatan, dukungan psikososial, pengurangan resiko bencana, pembentukan kelompok ekonomi perempuan, dan lainnya.

DP3A menggandeng Sub-Klaster Perlindungan Hak Perempuan (PHP) untuk memberdayakan perempuan dan anak pasca bencana Palu-Donggala di lokasi pengungsian (“Libatkan Jejaring Berdayakan” 2019). Bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah *training*, *focus group discussion*, *workshop* atau lokakarya yang bertempat di TRP. TRP sendiri didirikan oleh UNFPA yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melibatkan NGO lokal seperti Libu Perempuan dan KPKP-ST (Hajiji 2019). KPKP-ST bersama pihak lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri yang salah satunya adalah organisasi non-pemerintah asal Jepang, *Shanti Volunteer Association* (SVA) berusaha membangkitkan ekonomi serta penguatan ekonomi perempuan yang terdampak oleh bencana. Penguatan ekonomi perempuan bertujuan agar kualitas produk usaha yang diproduksi oleh kelompok perempuan memiliki nilai tambah di pasar. Salah satu produk yang dihasilkan oleh perempuan korban bencana ini adalah minyak goreng dari buah kelapa. Mereka juga terus

mendapat bantuan berupa pendampingan dan pembimbingan dengan melibatkan pemerintah, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Demi meningkatkan sumber daya manusia yang terampil dari kelompok perempuan, KPKP-ST bersama SVA akan melakukan pelatihan agar usaha atau industri kecil menengah bisa memicu perempuan untuk lebih kreatif dan berdaya. Perempuan pasca bencana membutuhkan bantuan pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga non-pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah dalam rangka mengembalikan kekuatan perempuan juga dilakukan oleh Yayasan Sikola Mombine yang menggandeng Actionaid Yappika.

Yayasan Sikola Mombine sendiri adalah organisasi non-pemerintah dan non-profit di Kota Palu yang dibangun sebagai ruang pendidikan pada masa tanggap darurat berupaya menyediakan makanan bergizi bagi kelompok rentan, mengorganisir donasi, dan menguatkan kelompok perempuan. Pembentukan Balai Belajar Perempuan, pendampingan hukum bagi korban dan hak-hak keperdataan korban serta penguatan mata pencaharian adalah beberapa aktivitas yang dilakukan Yayasan Sikola Mombine untuk menguatkan perempuan Palu-Donggala (Lasibani, 2022). Mereka memberikan pemulihan ekonomi dan memastikan program tersebut berjalan secara berkelanjutan dari yang tinggal di huntera hingga yang tinggal di luar huntera yang menjadi korban kekerasan gender dengan berbagai indikator kelompok rentan dan inklusi, seperti perempuan kepala keluarga dan yang sedang menjalankan usaha kecil dan menengah. Yayasan Sikola Mombine juga memberikan modal usaha, *Cash Voucher Assistance* (CVA) untuk melanjutkan dan

memulai kegiatan usaha. Sehingga, bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kemandirian ekonomi keluarga.

Terdapat pula dua rumah ramah perempuan atau yang disebut “Sampora Mombine” di Palu dan satunya posko pengaduan kasus di Donggala. Sikola Mombine, salah satu mitra YAPPIKA-Actionaid membuat posko tersebut bertujuan untuk sebagai posko aduan bagi perempuan dan anak yang mendapat kasus kekerasan agar ditangani oleh pihak berwajib. Selain itu, mereka juga membuat program *protection* sebagai program pemberdayaan perempuan agar perempuan memiliki peran kepemimpinan dan menjadi aktor perubahan dalam isu perlindungan perempuan pada pengurangan resiko bencana. Strategi perempuan untuk memberdayakan diri mereka setelah bencana dapat direalisasikan dengan bantuan-bantuan yang datang dari berbagai aktor.

Selain Yayasan Sikola Mombine masih ada yayasan lain yang turut membantu perempuan sebagai aksi strategi akar rumput untuk memberdayakan perempuan bencana Palu-Donggala. Salah satunya adalah Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK). YSKK bersama dukungan dari dana ChildFund dan AKH Germany memberikan dana stimulan berupa modal usaha untuk 560 perempuan korban bencana (Rasti, 2019). Iwan Setiyoko, Koordinator Unit Penggalangan Sumber Daya YSKK mengatakan “Bantuan usaha yang kita berikan berupa modal usaha pribadi dan kelompok usaha. Kita juga bantu alat-alat produksi untuk kelompok usaha”. YSKK juga bekerjasama dengan beberapa instansi seperti DP3A, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UMKM untuk menjalankan program tersebut. Produk dari pelaku usaha yang menerima bantuan

sebagian besar adalah sektor makanan, oleh karena itu mereka membantu memasarkan produk tersebut hingga ke luar daerah.

Fenomena bencana Palu-Donggala ini memperkuat temuan beberapa penelitian terkait relasi gender dan bencana di berbagai negara yang menyimpulkan bahwa strategi akar rumput menjadi cara bagi perempuan untuk membangun kembali kehidupan mereka yang sebelumnya banyak dirugikan. Dari penjelasan dan data-data di atas cukup jelas bahwa selain mendapat ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan setelah bencana, perempuan dan berbagai aktor bekerja sama untuk membuat perempuan menjadi lebih berdaya dan dapat kembali menjalani kehidupan. Upaya strategi akar rumput perempuan yang dilakukan pada bencana Palu-Donggala meliputi beberapa hal, yakni pemberian modal usaha, pembangunan rumah ramah perempuan, melakukan workshop, dan lokakarya yang bertujuan untuk menguatkan kelompok perempuan.

Hal tersebut sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Enarson sebelumnya terkait gender dan bencana, di mana perempuan yang terancam akibat bencana masih dapat mengelola risiko dan menanggapi bencana dengan baik. Seperti contoh yang diberikan oleh Enarson dalam bencana di India dan Turki pada 1990-an di mana LSM membantu kelompok perempuan lokal sehingga perempuan dapat bergerak dan mandiri di fase pemulihan dan membangun keterampilan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan hidup (Enarson, Fothergill, and Peek 2007, 138). Upaya akar rumput yang dilakukan pada bencana tersebut juga terjadi pada perempuan korban bencana alam Palu-Donggala. Oleh karena itu, konsep gender dan bencana serta contoh yang diberikan oleh Enarson cocok untuk isu strategi akar rumput perempuan korban bencana Palu-Donggala.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang rawan akan bencana alam dan berpotensi besar terkena tsunami dan gempa karena berada di garis khatulistiwa. Bencana alam gempa bumi yang mengguncang wilayah Palu dan Donggala pada 28 September 2018 dengan magnitudo 7,4 berhasil memporandakan wilayah tersebut kemudian diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi Utara pada pukul 18.02 WITA.

Gender dalam konteks bencana bukan hanya terkait penyebab bencana saja, melainkan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketidaksetaraan, seperti kekerasan, pembagian tugas yang tidak adil, dan kurangnya kehadiran suara perempuan dalam ruang publik. Perempuan Palu menjadi korban yang lebih dirugikan pasca bencana. Aspek gender dalam masyarakat memberikan perbedaan substansial mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan dari semua umur mengalami dan menghadapi sebelum, saat dan sesudah bencana. Oleh karena itu memperhatikan perbedaan gender dibutuhkan dalam melakukan mitigasi bencana.

Fenomena gender dan bencana sudah terjadi pada beberapa bencana yang pernah terjadi di dunia. Salah satunya dalam bencana Haiti, perempuan di sana mendapat kekerasan dan tekanan psikologis ketika mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi gender tradisional dalam peran mengasuh anak. Di beberapa kamp pada periode pasca gempa telah berkontribusi pada peningkatan pemerkosaan dan

kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ekonomi yang darurat juga mendorong peningkatan eksploitasi seksual wanita dan anak perempuan.

Melalui penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana analisis konsep gender dan bencana terjadi pada bencana alam Palu-Donggala 2018. Dengan konsep gender dan bencana oleh Enarson, Fothergill, dan Peek 2007 yang digunakan sebagai konsep penelitian yang menjelaskan dalam gender dan bencana memiliki enam *key findings* atau temuan utama. Namun, dalam studi kasus bencana Palu-Donggala hanya ditemukan empat temuan utama karena belum ditemukan data yang signifikan yang menunjukkan adanya isu gender untuk dua temuan lain, yakni kelas dan ras/etnis. Dari empat temuan tersebut, penulis menyimpulkan menjadi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rangkuman Hasil Analisis

Temuan Utama	Konsep Menurut Enarson dkk	Studi Kasus Bencana Palu-Donggala
Kekerasan Gender	Norma sosial dan perilaku peran dapat menyebabkan perempuan mendapat kekerasan lebih tinggi selama penanganan bencana. Kesenjangan gender yang kuat pada penanganan pasca bencana mendorong laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual, fisik, maupun mental	Fenomena kekerasan gender yang terjadi pada perempuan korban Palu-Donggala adalah percobaan pemerkosaan, perkawinan anak, trafficking, KDRT, pengabaian kebutuhan khusus perempuan, dan pelecehan.
Ketimpangan Tugas	Peran dan tanggung jawab pengasuhan dapat meningkatkan kerentanan pada perempuan sebelum bencana dan pada fase pemulihan dengan menjadi	Beban ganda setelah bencana dengan menjadi sosok ibu atau anak perempuan yang harus mengurus urusan rumah tangga dan mencari nafkah. Mereka juga merelakan jatah asupan

	beban tambahan pada perempuan.	makan mereka untuk diberikan kepada anak-anak
Kurangnya Partisipasi	Secara keseluruhan, terlepas dari kerja keras perempuan dalam bantuan dan pemulihan, sebagian besar penelitian menemukan bahwa perempuan tidak berada dalam posisi otoritas. Keterbatasan hak-hak politik dan kurangnya informasi tentang hak-hak hukum yang ada menambah hambatan bagi pemulihan perempuan	Perempuan kurang mendapat ruang untuk bersuara karena beberapa hal, yakni ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah, mereka tidak diakomodasi atau dihargai, masih adanya budaya patriarki, kurangnya 'keahlian kemanusiaan' atau kurang terampil, serta meskipun mereka dilibatkan namun hanya sebagai peran administratif dan manajemen menengah ke bawah.
Strategi Akar Rumput	Perempuan dapat mengorganisir di tingkat akar rumput untuk mengelola risiko dan menanggapi bencana. Koalisi feminis akar rumput bekerja untuk menyatukan perempuan dalam proses pembangunan kembali dan mendukung rencana pemulihan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki	Upaya strategi akar rumput perempuan yang dilakukan pada bencana Palu-Donggala meliputi beberapa hal, yakni pemberian modal usaha, pembangunan rumah ramah perempuan, dan melakukan lokakarya yang bertujuan untuk menguatkan kelompok perempuan.

Tabel di atas merangkum hal-hal penting yang terjadi dalam empat temuan utama dalam konsep gender dan bencana pada bencana Palu-Donggala. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ditemukan keterkaitan antara konsep gender dan bencana dalam empat temuan utama, di mana perempuan sebagai gender yang lebih mendapat dampak negatif pasca bencana alam Palu-Donggala 2018 dan mereka juga berusaha memberdayakan diri melalui strategi akar rumput.

4.2. Rekomendasi

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini penulis mengajukan beberapa saran untuk penelitian yang sudah penulis lakukan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang diajukan oleh penulis:

1. Perluas penelitian mengenai konsep bencana dan gender bukan hanya pada kelompok perempuan, melainkan terhadap kelompok lain seperti anak-anak atau orang tua yang juga sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perhatian.
2. Bencana merupakan isu internasional dan terdapat banyak bencana yang terjadi di dunia, oleh karena itu penelitian mengenai gender dan bencana dapat dipertimbangkan untuk diteliti pada bencana lain.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Acciari, Fordham, Masson. 2020. Centre for Gender and Disaster Gender and Disaster. Bibliography & Reference Guide – Volume 1. UCL: London.
- Aminah, Fadlia. 2011. “MAKNA WANITA TENTANG PERUBAHAN PERAN (Hasil Kajian Disertasi Wanita Isteri Nelayan Suku Kaili Dalam Perubahan Peran Dari Domestik Tradisional Ke Publik Produktif).” *Media Litbang Sulteng*.
- Ananda, Santoso, dan Zaenuddin. M. (2019). Perlindungan Perempuan Korban Bencana. *Share : Social Work Journal* 9 (1): 109.
- Alfarizy, Rizky. 2020. “Penjarahan Dan Kekerasan Domestik Pasca Gempa Bumi Dan Tsunami Di Sulawesi Tahun 2018: Analisis General Strain Theory.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16 (2).
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/12574>.
- Anisa, and Meilanny Budiarti Santoso. 2020. “Advokasi Pekerja Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana” 7 (1): 208–17.
- Ashraf, Mirza Ali, and Md. Abul Kalam Azad. 2015. “Gender Issues in Disaster: Understanding the Relationships of Vulnerability, Preparedness and Capacity.” *Environment and Ecology Research* 3 (5): 136–42.
<https://doi.org/10.13189/eer.2015.030504>.
- Bradley, Zara Martin, Bashnu Subedu, and Sumeera Shrestha. 2021. “Gender and Disaster: The Impact of Natural Disasters on Violence Against Women in Nepal.” *Journal of Asian and African Studies* 1–18.
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00219096211062474>
- Fauzi, Mohammad, and Mussadun. 2021. “DAMPAK BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI DI KAWASAN PESISIR LERE KOTA PALU.” *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* 17, No.1: 16–24.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v17i1.29967>.
- H, Gilang. 2020. “April 2020, Korban Gempa Palu Pindah ke Hunian Tetap.” Atmago. https://www.atmago.com/berita-warga/april-2020-korban-gempa-palu-pindah-ke-hunian-tetap_4533cd65-d5df-480c-bfc2-9d05b8593add.
- Julius, Nugroho, Anugrah, Leopatty, Yatimantoro, Rudy, Agung, et al. 2020. “SOSIALISASI LAPANGAN PASCA BENCANA GEMPABUMI DAN TSUNAMI DI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 | Julius | Jurnal Manajemen Bencana (JMB),” December.
<https://doi.org/10.33172/jmb.v6i2.621>.
- Kango, Umin. 2009. “BENTUK-BENTUK KEKERASAN YANG DIALAMI PEREMPUAN.” *JURNAL LEGALITAS* 2 (01).
<https://doi.org/10.33756/jelta.v2i01.630>.
- Kurniawan, A., Maarif, S., & Rahardi, C. S. . (2021). The Role of Women in Community Development after Earthquake, Tsunami, and Liquefaction in Central Sulawesi, Indonesia. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 722–742. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1420>
- Lidiawati, Erna D. n.d. “Ketika Huntara Serasa Neraka.” *teras.id*.
<https://www.teras.id/program/setahun-bencana-sulteng/ketika-huntara->

serasa-neraka.php.

- Milawaty. 2021. "Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat : Studi Kasus Kekerasan Seksual Pascabencana Alam Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik* 17 (1): 117–50. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.65>.
- Nuriana, Rusyidi, and Fedryansyah. 2019. "MITIGASI BENCANA BERBASIS SENSITIVE GENDER." *Share: Social Work Journal* 9 (2): 179–94. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.25562>.
- Rahmawati, S., Tengilimoglu, D. D., Monsalve, S. D., Bohari, B., Jaya, A. H., Yunus, S., & Rahman, N. 2021. The Health Life Quality Portrait of Kaili Da'a Women Couples Violence for the Victims of Tsunami, Earthquake, and Liquefaction through Family Economic Empowerment in Central Sulawesi Indonesia.
- Samad, Erdiansyah, and Wulandari. 2020. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana Di Sulawesi Tengah) | Samad | Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)." *Jurnal Ilmu Administrasi UMGO Vol. 9, No 1*. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/499>.
- Sarapang, Herni Tandi, Octavianus H. A. Rogi, and Poli Hanny. 2019. "ANALISIS KERENTANAN BENCANA TSUNAMI DI KOTA PALU." *SPASIAL* 6 (2): 432–39.
- Saito, Fumie. 2012. Women and the 2011 East Japan Disaster. *Journal of Gender & Development*, 20:2, pg 265-279
- Singgani, Arnah. 2007. "Perempuan Dalam Kancan Politik Lokal :: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah." Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/34899.
- UN Women – Asia-Pacific. 2017. Gender and Inclusion Alert: Central Sulawesi Earthquake and Tsunami." <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/central-sulawesi-earthquake-and-tsunami>.

Buku

- Amri, Yulianti, Yunus, and Wiguna. 2016. *Resiko Bencana Indonesia*. Edited by Jati and Amri. Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana. https://inarisk.bnpp.go.id/pdf/Buku%20RBI_Final_low.pdf.
- Enarson and Chakrabarti. 2009. *Women, Gender and Disaster: Global Issues and Initiatives*. <https://doi.org/10.4135/9788132108078>.
- Enarson, Fothergill, and Peek. 2007. *Handbook of Disaster Research*. Handbooks of Sociology and Social Research. New York, NY: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-32353-4>.
- Purnama. 2017. *Modul Manajemen Bencana*. Simdos Unud. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/abbf7e649748d49cbf426b1db1b8bc01.pdf.
- Purwanti, Ani. 2020. *KEKERASAN BERBASIS GENDER. BILDUNG*.
- Aminah, Fadlia. 2011. "MAKNA WANITA TENTANG PERUBAHAN PERAN (Hasil Kajian Disertasi Wanita Isteri Nelayan Suku Kaili Dalam Perubahan Peran Dari Domestik Tradisional Ke Publik Produktif)." *Media Litbang Sulteng*.

- “Pedoman Pengintegrasian Gender Dalam Klaster kangoPP-s.Pdf.” n.d. Accessed February 6, 2023. <https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/id-Pedoman-Pengintegrasian-Gender-dalam-Klaster-PP-s.pdf>.
- Julianty, Julianty. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Istri Korban Penelantaran Rumah Tangga Di Wilayah Kota Palu).” *Legal Opinion*. Journal:eArticle, Tadulako University. <https://www.neliti.com/publications/148973/>.
- Nur, Rosmala. 2012. “Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Masa Hamil Di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah | Nur | Humaniora” 24, No1. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/1038>.
- Nuriana, Rusyidi, and Fedryansyah. 2019. “MITIGASI BENCANA BERBASIS SENSITIVE GENDER.” *Share : Social Work Journal* 9 (2): 179–94. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.25562>.
- Rodríguez, Havidán, Enrico L. Quarantelli, and Russell R. Dynes. 2007. *Handbook of Disaster Research*. Handbooks of Sociology and Social Research. New York, NY: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-32353-4>.
- Samad, Erdiansyah, and Wulandari. 2020. “Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana Di Sulawesi Tengah) | Samad | Publik (Jurnal Ilmu Administrasi).” *Jurnal Ilmu Administrasi UMGO* 9, No 1. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/499>.
- Singgani, Arnah. 2007. “Perempuan Dalam Kancah Politik Lokal :: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.” Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/34899.
- Wahab, Gusnarib. 2008. “GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM: STUDI KEPEMIMPINAN PADA LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI SULAWESI TENGAH.” *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 5 (2): 227–40. <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.172.227-240>.

Artikel Daring

- Ariansyah, Aldi. 2022. “BNPB.” Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan Lokal dalam Penanggulangan Bencana. 2022. <https://bnpb.go.id/berita/partisipasi-dan-kepemimpinan-perempuan-lokal-dalam-penanggulangan-bencana>.
- Arshandi, and Ridwan. 2019. “Iwapi Bantu Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Palu.” Antara News Palu. 2019. <https://sulteng.antaranews.com/berita/74224/iwapi-bantu-pemulihan-ekonomi-korban-bencana-palu>.
- BPBD Kabupaten Bogor. 2022. 10 Bencana Alam Terbesar di Indonesia, Pernah Tewaskan Sebagian Besar Penduduk Bumi – BPBD Kabupaten Bogor. Accessed November 24, 2022. https://cdn.bmkg.go.id/Web/Ulasan-Gempa-DONGGALA_28092018_rev13102018.pdfnifas
- “Gender Snapshot: Central Sulawesi Earthquake and Tsunami.” n.d. UN Women – Asia-Pacific. Accessed August 18, 2022. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital->

- [library/publications/2018/12/gender-snapshot](https://www.antaranews.com/berita/831034/memulihkan-ekonomi-perempuan-pascabencana-sulteng).
- Hajiji. 2019. "Memulihkan Ekonomi Perempuan Pasca bencana Sulteng." Antara News. April 15, 2019. <https://www.antaranews.com/berita/831034/memulihkan-ekonomi-perempuan-pascabencana-sulteng>.
- Henschke and Lin. 2018. "Gempa, Tsunami Dan Likuifaksi: Rangkaian Bencana Di Palu Yang Perlu Anda Ketahui - BBC News Indonesia." <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45832237>.
- Indonesia UNFPA. 2019. "Penilaian Cepat Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Masa Darurat Di Palu, Sigi Donggala, Sulawesi Tengah." 2019. <https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20assessment%20in%20Central%20Sulawesi-BHS%20FIN%20%281%29rev%20%282%29.pdf>.
- Lasibani. 2022. "Menuju Kemandirian Ekonomi Penyintas melalui Bantuan Non Tunai Sumber Penghidupan (BaNTu Hidup) di Sulawesi Tengah | BaKTINews." 2022. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/menuju-kemandirian-ekonomi-penyintas-melalui-bantuan-non-tunai-sumber-penghidupan-bantu>.
- "LIBATKAN JEJARING BERDAYAKAN PEREMPUAN & ANAK DI PENGUNGSIAN - DP3A Prov Sulteng." 2019. May 13, 2019. <https://dp3a.sultengprov.go.id/libatkan-jejaring-berdayakan-perempuan-anak-di-pengungsian/>.
- Margani, Suciati S., Faharuddin, Peni Setiyowati, Fendy Apriyadi, Khadijah, and Papintana. 2018. "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PROFIL GENDER TEMATIK." *DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI SELATAN*. https://dp3a.sulselprov.go.id/siga/assets/uploads/docs/Profil_Tematik_KtP_A.pdf.
- Mazrieva, Eva. 2018. "Kebutuhan Khusus Perempuan Di Penampungan, Sudahkah Terpenuhi?" VOA Indonesia. Accessed January 5, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/kebutuhan-khusus-perempuan-di-penampungan-sudahkah-terpenuhi-/4600828.html>.
- Natalia. 2019. "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sulteng Meningkatkan Tajam." kumparan. 2019. <https://kumparan.com/paluposokekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-sulteng-meningkat-tajam-1sV2Lrwk6Tj>.
- Rasti. 2019. "Perempuan Penyintas Korban Bencana Sulteng Diberi Modal Usaha." *MNews* (blog). September 25, 2019. <https://mnews.co.id/read/berita-lainnya/perempuan-penyintas-korban-bencana-sulteng-diberi-modal-usaha/>.
- Riana, Friski. 2018. "JK: Bantuan Luar Negeri Gempa Palu Dan Donggala Untuk Dua Hal - Nasional Tempo.Co." 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1132281/jk-bantuan-luar-negeri-gempa-palu-dan-donggala-untuk-dua-hal>.
- Tamrin Muhakir. 2019. "Nasib Pilu Pengungsi Korban Gempa Tsunami Palu-Donggala, Ada 56 Korban Kasus Kekerasan Sek5ual - Tribun-Medan.Com." 2019. <https://medan.tribunnews.com/2019/07/24/nasib-pilu-pengungsi-korban-gempa-tsunami-palu-donggala-ada-56-korban-kasus->

[kekerasan-seksual](#).

<https://bpbd.bogorkab.go.id/10-bencana-alam-terbesar-di-indonesia-pernah-tewaskan-sebagian-besar-penduduk-bumi/>.

Cite

